

LAPORAN TAHUNAN

2019

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi,
Delta Mas. Sukamahi. Cikarang Pusat.
Kabupaten Bekasi. Jawa Barat

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Tahunan 2019 ini dapat tersusun meskipun dengan waktu yang sangat singkat, semua ini berkat kerja sama antara sub-sub bagian di kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

Penyusunan Laporan Tahunan 2019 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2019.

Buku Laporan Tahunan 2019 berisikan semua kegiatan-kegiatan yang ada pada kantor Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2019, Laporan Tahunan 2019 ini disamping sebagai laporan atasan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Demikian Laporan Tahunan ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Tahunan ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.

CIKARANG, 07 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTU CEDE ASTAWA, S.H., M.H.
NIP. 197806052000121003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II A. Keadaan Perkara.....	10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
1.1. Perkara Perdata Permohonan	10
1.2. Perkara Perdata Gugatan.....	10
1.3. Perkara Pidana Biasa dan Khusus	11
1.4. Perkara Pidana Anak.....	11
1.5. Perkara Pidana Pra Peradilan	12
1.6. Perkara Pidana Pidana Cepat	12
1.7. Perkara Pidana Lalu - Lintas	13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	13
2.1. Perkara Pidana Banding.....	13
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	14
3.1. Perkara Pidana Kasasi.....	14
4. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali	14
4.1. Perkara Pidana Peninjauan Kembali	14
5. Keadaan Perkara Pidana Grasi	15
4.1. Perkara Pidana Grasi.....	15
B. Penyelesaian Perkara.....	15
1. Jumlah Perkara Yang Putus.....	15
2. Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu	16
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	16
4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi	16
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	17
a). Posbakum	17
b). Sidang Keliling	17
c). Perkara Prodeo	17

BAB III Sumber Daya Manusia.....	18
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	19
b. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	19
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.....	19
2. Sumber Daya Manusia NonTeknis Yudisial.....	20
3. Mutasi.....	20
a. Mutasi Masuk.....	21
b. Mutasi Keluar.....	21
4. Promosi.....	22
5. Pensiun.....	22
6. Diklat.....	22
7. Pengisian Jabatan Struktural.....	23
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana, Prasarana Dan Teknologi Informasi.....	25
A. Pengelola Keuangan.....	25
a). Pengelolaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi.....	25
b). Pengelola Anggaran DIPA Badan Peradilan Umum.....	25
c). Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	26
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	28
1. Implementasi e-court.....	28
2. Implementasi SIPP.....	28
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....	30
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	30
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	30
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	31
BAB VI Pengawasan.....	37
A. Internal.....	37
B. Evaluasi.....	39
BAB VII Penutup.....	40
A. Kesimpulan.....	40
A. Rekomendasi.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Cikarang merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru yang diresmikan oprasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Setelah pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Oktober 2018 yang diikuti pelantikan Wakil Ketua dan seluruh pejabat struktural dan fungsional baik kesekretariatan maupun kepaniteraan maka sejak saat itu Pengadilan Negeri Cikarang mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Mahkamah Agung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan di Kabupaten Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang mendasarkan pada hal-hal sebagaimana dibawah ini.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Cikarang adalah peradilan tingkat pertama yang mempunyai wilayah hukum meliputi Kabupaten Cikarang. Dalam perkembangannya pada tahun 2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI dituntut agar lebih independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom masyarat dalam mencari keadilan.

Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan 2019 pada kantor Pengadilan Negeri Cikarang yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2019.

Tujuan Laporan tahunan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan Tahunan berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peadilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Cikarang ada program prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Cikarang juga telah membuat program website Pengadilan Negeri Cikarang dengan alamat : <http://pn-cikarang.go.id>, program telah berjalan dengan update setiap saat. dan juga pelayanan system informasi penuluruhan perkara (SIPP) melalui sipp.pn-cikarang.go.id/

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Cikarang telah menyediakan meja informasi. Selain itu terdapat meja pengaduan yang berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035,

Pengadilan Negeri Cikarang berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut.

B. VISI DAN MISI

V I S I

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG AGUNG “

M I S I

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negri Cikarang.
2. Memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Cikarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cikarang.

Memperbaiki aksan pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat ;

Dengan Motto Pelayanan “ **BISA** ” (Berintegritas, Inovasi, Semangat, Akurat)

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja peradilan dengan upaya :
 - Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dengan peningkatan pendidikan dan keahlian.
 - Meningkatkan disiplin dan moralitas aparat peradilan dengan menegak peraturan disiplin kepegawaian dan kode etik (*Court of Conduct*) bagi pejabat peradilan
 - Memantapkan penerapan administrasi keperkaraan dan administrasi kesekretariatan berbasis IT (*Information Technology*)
2. Meningkatkan transparansi manajemen peradilan supaya mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 144/KMA/SK/I/2011, khususnya mengenai :
 - Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Pedoman Pelayanan Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.
 - Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Pedoman ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum
3. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan, khususnya sarana Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang yang sesuai dengan standar Gedung peradilan kelas II di Indonesia.

Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
- Meningkatkan kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
- Menjamin tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
- Meningkatkan disiplin aparatur peradilan.

4 Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, selain itu peningkatan kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

5 Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, guna mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang dengan Motto “Pelayanan Prima dan Putusan Berkualitas” dengan kebijakan mutu :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Cikarang.

5. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan Kualitas SDM

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyelesaian Minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hokum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

6 (Enam) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penyelesaian upaya hukum perkara Pidana dan Perdata disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dari Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dari Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Tersajinya satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan ;
- b. Terselenggaranya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- c. Pedoman pengelolaan keuangan Negara ;
- d. Laporan kegiatan biro keuangan ;
- e. Terselenggaranya operasional perkantoran dan non operasional satker daerah ;
- f. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- g. Pedoman Pengadaan Sarana dan Prasarana ;
- h. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan baik;

- i. Penyelesaian administrasi Berkas Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu ;
- j. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum ;
- k. Pelaksanaan *zitting plaats* (tempat sidang tetap) dan pelaksanaan Pembebasan Perkara Prodeo ;
- l. Jumlah standart pelaksana tata kerja dan tata kelola Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum yang disusun ;
- m. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum ;
- n. Ketersediaan data dan dokumen statistik perkara dilingkungan Peradilan Umum yang akurat.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Cikarang diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Cikarang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Cikarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2019-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang dapat terwujud dengan baik.

BAB II

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

1.1. Perkara Perdata Permohonan

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata permohonan tahun 2019 :

**KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	27	48	4	33	38
2	Februari		43	5	31	45
3	Maret		138	2	65	116
4	April		26	13	39	90
5	Mei		21	6	35	70
6	Juni		28	8	13	77
7	Juli		51	26	85	17
8	Agustus		160	21	58	98
9	September		39	1	113	23
10	Oktober		78	1	45	55
11	November		41	6	30	60
12	Desember		42	4	51	47
Jumlah		27	715	97	598	47

1.2. Perkara Perdata Gugatan

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata Gugatan tahun 2019 :

**KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	51	23	2	9	63
2	Februari		25	5	6	77
3	Maret		31	4	10	94
4	April		27	7	15	99
5	Mei		21	7	16	97
6	Juni		22	3	6	110
7	Juli		27	9	30	98
8	Agustus		30	6	14	108
9	September		31	-	20	119
10	Oktober		25	6	21	117
11	November		30	2	20	125
12	Desember		32	2	18	137
Jumlah		51	324	53	185	137

1.3. Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus tahun 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	113	61	60	114
2	Februari		63	59	118
3	Maret		69	64	123
4	April		62	63	122
5	Mei		83	69	136
6	Juni		24	52	108
7	Juli		51	63	96
8	Agustus		42	42	96
9	September		52	64	84
10	Oktober		70	57	97
11	November		87	37	147
12	Desember		70	53	164
Jumlah		113	734	683	164

1.4. Perkara Pidana Anak

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Anak tahun 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA ANAK
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	-	6	4	2
2	Februari		4	4	2
3	Maret		2	2	2
4	April		5	3	4
5	Mei		-	3	1
6	Juni		-	1	-
7	Juli		1	-	1
8	Agustus		3	2	2
9	September		3	3	2
10	Oktober		3	5	-
11	November		1	-	1
12	Desember		2	-	3
Jumlah		-	30	27	3

1.5. Perkara Pidana Pra Peradilan

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Pra Peradilan 2019 :

**KEADAAN PERKARA PRA PERADILAN
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	2	-	2	-
2	Februari		1	-	1
3	Maret		2	1	2
4	April		-	2	-
5	Mei		-	-	-
6	Juni		-	-	-
7	Juli		-	-	-
8	Agustus		2	-	2
9	September		-	1	1
10	Oktober		-	1	-
11	November		1	-	1
12	Desember		-	1	-
Jumlah		2	6	8	-

1.6. Perkara Pidana Cepat

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Cepat 2019 :

**KEADAAN PERKARA CEPAT
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari		2	2	-
3	Maret		-	-	-
4	April		-	-	-
5	Mei		-	-	-
6	Juni		-	-	-
7	Juli		3	3	-
8	Agustus		-	-	-
9	September		-	-	-
10	Oktober		2	2	-
11	November		1	1	-
12	Desember		-	-	-
Jumlah		-	8	8	-

1.7. Perkara Pidana Lalu- Lintas

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Lalu – Lintas 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa		Denda	Biaya Perkara	
		Tahun 2018	Masuk			Putus
1	Januari	-	9.956	9.776	Rp. 750.924.000	Rp. 9.776.000
2	Februari		6.713	6.893	Rp. 523.407.000	Rp. 6.893.000
3	Maret		10.527	10.527	Rp. 804.073.000	Rp. 10.527.000
4	April		1.971	1.816	Rp. 142.174.000	Rp. 1.816.000
5	Mei		1.007	1.162	Rp. 91.568.000	Rp. 1.162.000
6	Juni		1.314	1.314	Rp. 103.096.000	Rp. 1.314.000
7	Juli		2.875	2.875	Rp. 208.075.000	Rp. 2.875.000
8	Agustus		9.243	9.243	Rp. 902.043.000	Rp. 9.243.000
9	September		9.806	9.806	Rp. 789.794.000	Rp. 9.806.000
10	Oktober		7.523	6.079	Rp. 494.011.000	Rp. 6.079.000
11	November		10.927	12.371	Rp. 1.033.209.000	Rp. 12.371.000
12	Desember		5.000	5.000	Rp. 411.260.000	Rp. 5.000.000
Jumlah		-	76.862	76.862	Rp. 6.253.634.000	RP. 76.862.000

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

2.1 Perkara Pidana Banding

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Banding 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA BANDING
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa		Banding		Sisa
		Tahun 2018	Masuk	Yang Dicabut	Yang Dikirim	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari		1	-	1	-
3	Maret		-	-	-	-
4	April		-	-	-	-
5	Mei		6	-	6	-
6	Juni		1	-	1	-
7	Juli		-	-	-	-
8	Agustus		-	-	-	-
9	September		5	-	5	-
10	Oktober		3	-	3	-
11	November		2	-	2	-
12	Desember		6	-	-	6
Jumlah		-	24	--	18	6

3. Keadaan Perkara Pidana Kasasi

3.1 Perkara Pidana Kasasi

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Kasasi 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA KASASI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Kasasi Yang Dicabut	Kasasi Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari		-	-	-	-
3	Maret		-	-	-	-
4	April		-	-	-	-
5	Mei		-	-	-	-
6	Juni		1	-	1	-
7	Juli		-	-	-	-
8	Agustus		1	-	1	-
9	September		1	-	1	-
10	Oktober		-	-	-	-
11	November		2	-	1	1
12	Desember		3	-	-	4
Jumlah		-	8	-	4	4

4. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali

4.1 Perkara Pidana Peninjauan Kembali

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Peninjauan Kembali 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	PK Yang Dicabut	PK Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari		-	-	-	-
3	Maret		-	-	-	-
4	April		-	-	-	-
5	Mei		-	-	-	-
6	Juni		-	-	-	-
7	Juli		-	-	-	-
8	Agustus		-	-	-	-
9	September		-	-	-	-
10	Oktober		-	-	-	-
11	November		-	-	-	-
12	Desember		-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

5. Keadaan Perkara Perkara Pidana Grasi

5.1 Perkara Pidana Grasi

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Grasi 2019 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA GRASI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Bulan	Sisa Tahun 2018	Masuk	Kasasi Yang Dicabut	Kasasi Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari		-	-	-	-
3	Maret		-	-	-	-
4	April		-	-	-	-
5	Mei		-	-	-	-
6	Juni		-	-	-	-
7	Juli		-	-	-	-
8	Agustus		-	-	-	-
9	September		-	-	-	-
10	Oktober		-	-	-	-
11	November		-	-	-	-
12	Desember		-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Berikut ini tabel mengenai Jumlah sisa Perkara 2018 yang diputus 2019 :

**JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Perkara	Sisa Tahun 2018	Putus Tahun 2019	Persentase
1	Permohonan	27	27	100%
2	Gugatan	51	51	100%
3	Pidana Biasa & Pidana Singkat	113	113	100%
4	Pidana Anak	-	-	-
5	Pidana Pra Peradilan	2	2	100%
6	Pidana Cepat	-	-	-
7	Pidana Lalu Lintas	-	-	-
Jumlah		193	193	100%

2. Berikut ini tabel mengenai Jumlah perkara yang diputus tepat waktu:

**JUMLAH PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU
PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Perkara	Total Perkara	Putus Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Persentase
1	Permohonan	715	715	-	100%
2	Gugatan	324	317	7	97,84%
3	Pidana Biasa & Pidana Singkat	744	685	59	92,07%
4	Pidana Anak	30	27	3	90%
5	Pidana Pra Peradilan	6	6	-	100%
6	Pidana Cepat	8	8	-	100%
7	Pidana Lalu Lintas	76.862	76.862	-	100%
Jumlah		78.689	78.620	69	99,91%

3. Berikut ini tabel Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2019 :

**JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
BANDING, KASASI DAN PK
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Perkara	Total Perkara	Mengajukan	Tidak Mengajukan	Persentase
1	Permohonan	715	-	715	100%
2	Gugatan	324	14	310	95,68%
3	Pidana Biasa & Pidana Singkat	744	24	720	96,77%
4	Pidana Anak	30	6	24	80%
5	Pidana Pra Peradilan	6	-	6	100%
6	Pidana Cepat	8	-	8	100%
Jumlah		1.827	44	1.783	97,59%

4. Berikut ini tabel mengenai Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi:

**JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Perkara	Total Perkara	Tidak Berhasil	Berhasil	Berjalan	Persentase
1	Gugatan	123	98	10	15	9,26%

5. Berikut ini tabel mengenai Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi:
JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2019
PER 31 DESEMBER 2019

No	Perkara	Total Perkara	Tidak Berhasil	Behasil	Persentase
1	Pidana Anak	30	24	6	20%

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Cikarang telah terakreditasi dengan nilai A Excellent. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H pada Hari Rabu, tanggal 18 September 2019 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Ahmad Yani, Jakarta diterima oleh Ketua PN Cikarang bersama dengan 25 ketua pengadilan negeri lainnya.

Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang didasarkan pada kerangka peradilan pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan.

a) POSBAKUM

Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Cikarang melaksanakan kerjasama untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Pencari Keadilan Dengan Pos Bantuan Hukum Peradi Cikarang dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Satya Bela Keadilan

b) Sidang Keliling

Saat ini belum melaksanakan Sidang Keliling dan belum ada Permohonan Sidang Yustisi yang masuk ke Pengadilan Cikarang

c) Perkara Prodeo

Saat ini Perkara Prodeo yang masuk ke Pengadilan Cikarang 1 Perkara Prodeo Banding

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Cikarang dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor dan Hubungan Industrial Cikarang mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Cikarang dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah 14 dengan perincian:

Ketua	: 1	Orang
Wakil Ketua	: 1	Orang
Hakim	: 10	Orang
Panitera	: 1	Orang
Sekretaris	: 1	Orang
Panitera Muda Hukum	: 1	orang
Panitera Muda Perdata	: 1	Orang
Panitera Muda Pidana	: 1	Orang
Ka.Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: 1	Orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	: 1	Orang
Ka.Sub.Bag. Perencanaan, Informasi Teknologi Pelaporan	: 1	Orang

Panitera Pengganti	: 5	Orang
Juru sita	: 2	Orang
Juru Sita Pengganti/Staf	: 1	Orang
Staf	: 3	Orang
Calon Hakim	: 9	Orang

Sedangkan tenaga honorer yang ada:

- Satpam : 2 Orang
- Pengemudi : 2 Orang
- Kebersihan : 2 orang

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	II	1
2	III	26 + 9 (Cakim)
3	IV	4

b. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	12
3	S1	29 + 9 (Cakim)
4	DIII	2
5	SLTA	-
6	SLTP	-

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pada Pengadilan Negeri Cikarang, Hakim yang ada sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah 12 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Adapun nama-nama hakim yang ada adalah sebagai berikut

- Ketua : I PUTU GEDE ASTAWA, S.H, M.H.
- Wakil Ketua : ALI SOBIRIN, S.H, M.H.
- Hakim-hakim : 1 DECKY CHRISTIAN S., S.H.
- 2 AL FADJRI, S.H.
- 3 RECHTIKA DIANITA, S.H, M.H.
- 4 MUHAMMAD NAFIS, S.H.

- 5 CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.
- 6 AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H.
- 7 HANDRY SATRIO, S.H., M.H.
- 8 ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.
- 9 RIZKI RAMADHAN, S.H.
- 10 SAMSIATI, S.H., M.H.

Disamping sebagai Majelis Hakim para Hakim mempunyai tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dengan susunan menyesuaikan dengan jumlah Hakim pada kurun waktu tersebut diatas, dan bertugas secara rolling sehingga para Hakim secara merata dapat bertugas secara menyeluruh bergantian kepada masing-masing Sub Bagian Administrasi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan,

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia non Teknis Yudisial dari Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para kepala Sub Bag, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Staf, yang mana untuk pembinaan ada pada Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda dan Kepala Sub.Bag.

Pada Kepaniteraan Pidana sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan ada 3 pegawai, sedangkan di Kepaniteraan Perdata ada 7 orang pegawai, untuk Kepaniteraan Hukum ada 2 orang pegawai, dengan 5 orang panitera Pengganti.

Di Bagian Kesekretariatan untuk Sub Bagian Umum dan Keuangan ada 7 orang pegawai, pada SubBagian Kepegawaian dan Ortala ada 3 orang pegawai, Sub Bag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan ada 2 Orang Pegawai.

3. Mutasi

a. Mutasi Masuk

No.	NAMA	Jabatan	Satker Asal	TMT
1.	SETIA PERMANA, SH.	STAF	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	02 Januari 2019
2.	CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	03 Januari 2019
3.	IMAN SUPRIATMAN, S.Mn.,SH.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	11 Januari 2019
4.	HENDI FIRLANDY, SE., SH.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	11 Januari 2019
5.	ARIE ADI SUCIADI, SH., MH.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	11 Januari 2019

6.	ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	15 Januari 2019
7.	HANDRY SATRIO, SH., MH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI BANGIL	15 Januari 2019
8.	MUHAMMAD NAFIS, SH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI KARANG ANYAR	16 Januari 2019
9.	DESIANA RAHMAWATI, SH.	STAF	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	22 Maret 2019
10.	NURUL SAKINAH WARDANI RANGKKUTI, A.Md.	CPNS	-	01 April 2019
11.	ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.	CPNS	-	05 April 2019
12.	RIZKI RAMADHAN, SH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	10 Juni 2019
13.	AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH.,MH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI BANJAR BARU	20 Juni 2019
14.	ADANG SUJANA, SH.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	16 Agustus 2019
15.	SYARIPUDIN, SH.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	16 Agustus 2019
16.	MOHAMAD ZAMZAM, A. Md.	JURUSITA	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	16 Agustus 2019
17.	EDDY WIYONO, SH., MH.	PANITERA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	06 September 2019
18.	ALI SOBIRIN, SH., MH.	WAKIL KETUA	PENGADILAN NEGERI RENGAT	15 November 2019
19.	SAMSIATI, SH., MH.	HAKIM	PENGADILAN NEGERI BANJAR BARU	18 November 2019

b. Mutasi Keluar

No.	NAMA	Jabatan	Satker Tujuan	TMT
1.	IYUS YUSUF, SH., MH.	Panitera (IV/a)	Pengadilan Negeri Depok	30 Agustus 2019
2.	GUNTORO EKA SEKTI, SH., MH.	Wakil Ketua (IV/a)	Pengadilan Negeri Batang	12 November 2019

4. Promosi

No.	NAMA	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1.	IYUS YUSUF, SH., MH.	Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II	Panitera Pengadilan Negeri Depok Kelas I B	30 Agustus 2019
2.	GUNTORO EKA SEKTI, SH., MH.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II	Ketua Pengadilan Negeri Batang	12 November 2019

5. Pensiun

No.	NAMA	Jabatan	Pangkat	TMT	Keterangan
	NIHIL				

6. Diklat

No.	NAMA	Jabatan	Jenis Diklat
1.	GUNTORO EKA SEKTI, SH., MH.	WAKIL KETUA	Diklat Pimpinan Pengadilan
2.	NURMA SAOFIANE, SH.	SEKRETARIS	Diklat PIM IV
3.	ANDHIKA RAHMAN, SH.	KASUBAG PTIP	Diklat Pengadaan barang dan jasa
4.	MARTHA G AMALO, SH.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	Diklat Pengadaan barang dan jasa
5.	DESIANA RAHMAWATI, SH.	STAF	Diklat Sertifikasi Bendahara
	SETIA PERMANA, SH.	STAF	Diklat Sertifikasi Bendahara
6.	AMELIA PUTRINA LUMBANTOBING S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
7.	ADYANTI S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
8.	RIEYA APRIANTI S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
9.	JUNITIN SINAR HUMOMBANG NAINGGOLAN S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
10.	RICHARD ACHMAD SHAHFROELLAH S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim

11.	AZIZAH AMALIA S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
12.	TRI YUANITA INDRIANI S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
13.	ZULNIA PRATIWI S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
14.	SARAI DWI SARTIKA S.H.	CALON HAKIM	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
15.	ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.	CPNS	Diklat Latsar CPNS
16.	NURUL SAKINAH WARDANI RANGKUTI, A.Md.	CPNS	Diklat Latsar CPNS

7. Pengisian Jabatan Struktural

Dalam rangka pengembangan profesionalisme Jabatan baik Struktural maupun fungsional dan untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja maka guna meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan yang kompetitif dalam memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan langkah-langkah dalam pengusulan maupun pengisian Jabatan yang kosong. Dan masih mengacu pada Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural.

Untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang profesional sekaligus menampilkan sosok pejabat Struktural dalam pengangkatan dan pengisian jabatan struktural dengan cara menerapkan sistem keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi pegawai negeri sipil. Sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan mengacu system sebagai berikut:

1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pegawai yang akan diangkat menduduki jabatan struktural.
2. Pendidikan formal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pangkat / Gol Ruang serta masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan tersebut dengan cara melakukan uji kompetensi (kepatutan dan kelayakan) yang dilakukan oleh Ketua

Pengadilan Jakarta Pusat. Dan apabila lulus dan memenuhi syarat untuk diusulkan menduduki jabatan/mengisi jabatan tersebut.

Pada tahun 2019 susunan pejabat struktural pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang : I PUTU GEDE ASTAWA, S.H, M.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
2. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang : ALI SOBIRIN, S.H, M.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 15 November 2019
3. Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang : EDDY WIYONO, S.H, M.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 06 September 2019
4. Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang : NURMA SAOFIANE, S.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
5. Jabatan Struktural Panitera Muda Perdata : SUTRISNO, S.H, M.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
6. Jabatan Struktural Panitera Muda Pidana : EVI SETIA PERMANA, S.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
7. Jabatan Struktural Panitera Muda Hukum : DEWI TRISETYAWATI, S.H, M.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
8. Jabatan Struktural Kasub Umum dan Keuangan : MARTHA G. AMALO, S.E., M.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
9. Jabatan Struktural Kasub Organisasi dan Tata Laksana : SARI NURHAYATI, S.E. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
10. Jabatan Struktural Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : ANDHIKA RAHMAN, S.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018

BAB IV
PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran untuk operasional Pengadilan Negeri Cikarang 2019 sudah di kelola oleh DIPA Pengadilan Negeri Cikarang, Berikut untuk Anggaran operasional Pengadilan Negeri Cikarang;

a). Pengelolaan Anggaran dipa Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai

a) Pagu	Rp.	3.584.063.000,-
b) Realisasi	Rp.	3.305.309.177,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	278.753.823,-

2. Belanja Barang

a) Pagu	Rp.	572.910.000,-
b) Realisasi	Rp.	514.886.620,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	58.023.380,-

3. Belanja Modal

a) Pagu	Rp.	423.500.000,-
b) Realisasi	Rp.	384.365.000,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	39.135.000,-

b). Pengelolaan Anggaran dipa Badan Peradilan Umum

Belanja Barang

a) Pagu	Rp.	300.971.000,-
b) Realisasi	Rp.	300.826.450,-
c) Sisa Anggaran	Rp.	144.550,-

c). Pendapatan Negara Bukan Pajak

Bulan	Pendapatan
	03
January 2019	Rp 335.000
Februari 2019	Rp 455.000
Maret 2019	Rp 11.262.300
April 2019	Rp 2.800.000
Mei 2019	Rp 7.631.000
Juni 2019	Rp 1.010.000

Juli 2019	Rp 5.936.500
Agustus 2019	Rp 1.307.000
September 2019	Rp 15.414.000
Oktober 2019	Rp 7.929.000
November 2019	Rp 4.150.000
Desember 2019	Rp 8.915.500
Total	Rp 67.145.300

Adapun yang telah kami lakukan untuk menunjang kinerja pada Pengadilan Negeri Cikarang:

1. Sarana dan Prasarana Gedung;
 - a) Pengadaan
 - Pengadaan Laptop
 - Pengadaan Peralatan e-court
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
 - Pengadaan Peralatan ATR
 - b) Pemeliharaan
 - Perawatan Gedung Kantor Pengecatan
 - Perawatan Inventaris Kantor
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
 - a) Pengadaan
 - b) Pemeliharaan
 - c) Penghapusan

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II terletak di Gedung Zitting Plaats Pengadilan Negeri Bekasi yang terletak di kawasan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Berikut adalah daftar ruang sidang di lantai 1 dan 2 gedung utama Pengadilan,

No	Nama Ruang Sidang	Lantai
1	Ruang Sidang Utama	1
2	Ruang Sidang Anak	2
3	Ruang Sidang II	2

- MEJA INFORMASI

Meja informasi dan pengaduan yang terletak di lobi utama, berfungsi sebagai sarana Informasi, pendaftaran sidang, dan pengaduan bagi masyarakat yang berkepentingan.

- RUANG PANITERA MUDA PERDATA

Ruang Panitera Muda Perdata terletak di bagian samping gedung Sidang

- **RUANG SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**
Ruang Panitera Muda Perdata terletak di bagian samping gedung Sidang
- **RUANG PANITERA MUDA PIDANA**
Ruang Panitera Muda Perdata terletak di bagian samping gedung Sidang
- **RUANG JURUSITA**
Ruang Panitera Muda Perdata terletak di bagian samping gedung Sidang
- **RUANG KABAG UMUM**
Ruang Panitera Muda Perdata terletak di bagian samping gedung Sidang
- **RUANG PANITERA MUDA HUKUM**
Ruang Panitera Muda Perdata terletak di bagian samping gedung Sidang
- **RUANG TAHANAN**
Di area tengah Pengadilan terdapat dua ruang tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah ruang tahanan wanita, ruang tahanan dewasa dan ruang tahanan anak.
- **RUANG POSBAKUM**
Ruang yang diperuntukkan untuk memberikan advice dan bantuan hukum bagi pihak pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu secara financial.
- **AREA TUNGGU**
Area tunggu sidang tersedia di depan pintu masuk ruang sidang utama. Area ini merupakan area tertutup yang dilengkapi dengan tempat duduk, AC, Wifi Public.
- **TOILET UMUM**
Toilet umum terletak di dekat MUSHOLA.
- **KANTIN**
Kantin Pengadilan saat ini masih tergabung dengan kantin PEMDA Kabupaten yang terletak di depan gedung Pengadilan.
- **RUANG BANK BTN**
RUANG BANK BTN saat ini terletak di Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- **MUSHOLA**
Mushola terletak di area Pengadilan
- **RUANG MEDIASI**
Ruang mediasi adalah ruangan yang terletak di gedung sidang Pengadilan yang diperuntukkan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi.

- **TEMPAT PARKIR**

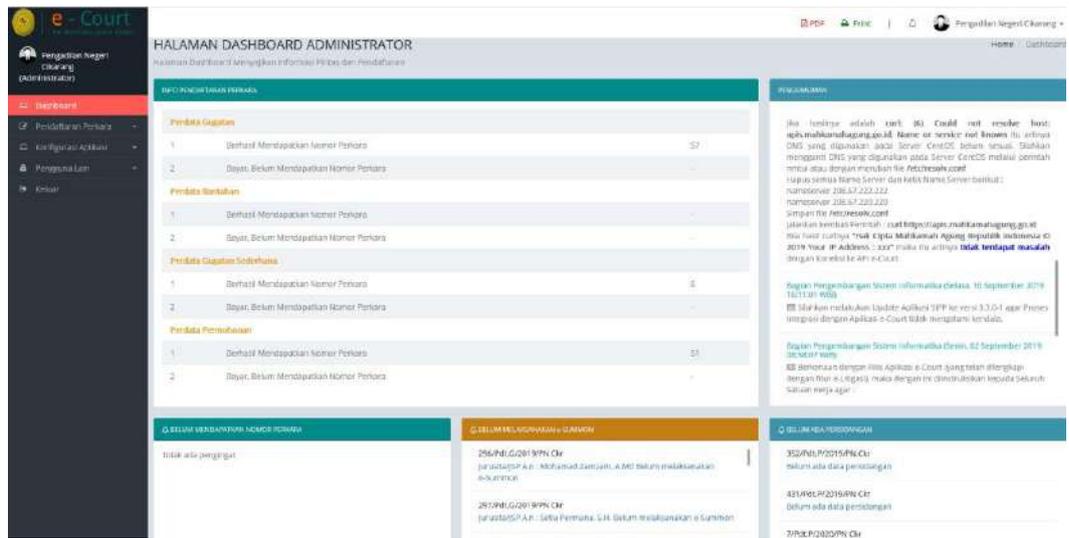
Tempat parkir tersedia untuk kurang lebih 20 mobil dan motor dan diperuntukkan untuk staf dan para pencari keadilan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung terlaksanakannya administrasi dan pelayanan secara umum Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah mengimplemasikan e- court dan SIPP:

1. Implementasi e- court

Pengadilan Negeri Cikarang Sudah Mengimplementasikan e-court sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 272/DJU/HM02.3/3/2019



2. Implementasi SIPP

Infrastruktur Perangkat Keras (*hardware*)

Pengadilan Negeri Cikarang Sudah Mengimplementasikan SIPP sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019



Berikut adalah perangkat keras pendukung implementasi teknologi informasi yang digunakan pada Pengadilan Negeri Cikarang.

No	Nama Perangkat	Jumlah	Keterangan
1	Server Dell Power EDGE 330	1	
2	Mikrotik Cloud Core CCR 1009-7G-1C-1S+	1	Pinjaman Kominfo Kab Bekasi
3	PC Unit All In One HP	8	
4	Laptop Lenovo IdeaPad 320	2	
5	Laptop Fujitsu	3	
6	Serial Printer HP Laserjet MFP M129-M134	4	
7	Switch Tp-Link Gigabit 8 Port	3	
8	Switch Tp-Link Gigabit 5 Port	1	
9	Unifi AP AC LR	3	
10	Rukus	2	
11	Asus Wireless 800-H	6	

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Untuk mendukung kinerja Satker selain aplikasi perkantoran yang umum digunakan, digunakan pula beberapa aplikasi khusus internal di lingkungan Mahkamah Agung untuk mendukung pelayanan utama pada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II.

No	Nama Aplikasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Server local, hosting dan User MA
2	Monitoring SIPP	Server lokal
3	Direktori Putusan	Server local, hosting dan User MA
4	SIKEP	Bag. Kepegawaian
5	Aplikasi PTSP	Server local
6	Aplikasi DMS	Server local
7	Aplikasi DSS	Server local

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Cikarang telah terakreditasi dengan nilai A Excellent. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H pada Hari Rabu, tanggal 18 September 2019 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Ahmad Yani, Jakarta diterima oleh Ketua PN Cikarang bersama dengan 25 ketua pengadilan negeri lainnya.

Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang didasarkan pada kerangka peradilan pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Selama 2 (dua) bulan sejak diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 22 Oktober 2018, kondisi pelayanan di Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II masih berpindah-pindah tempat di beberapa area kantor Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien, dan dari perspektif keamanan kondisi tersebut menyebabkan sulitnya mengawasi pengunjung yang tersebar.

Bahwa selain itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan untuk mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan agar menghindari munculnya KKN, di mana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada area peningkatan pelayanan publik, maka tercetus ide untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*). Sesuai pemikiran dari YM Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada pengukuhan beliau sebagai guru besar di UNAIR, bahwa tuntutan publik selalu menghendaki hasil yang cepat, dengan standar kepuasan yang cenderung

terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis. Sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

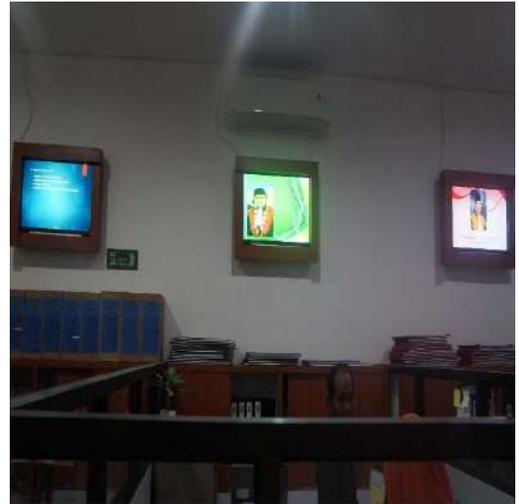
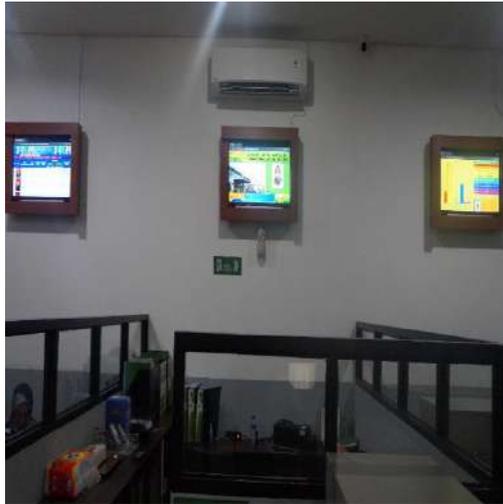
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. SURVEY IPK DAN IKM DENGAN QR CODE BERIKUT PENGHITUNGANNYA



Penggunaan QR Code pada IPK dan IKM memudahkan pengguna pengadilan untuk mengisi survey IPK dan IKM melalui Smartphone dengan cara scan QR Code yang akan mengarahkan pada link survey baik IPK maupun IKM PN Cikarang. Penghitungan yang dilakukan secara otomatis memudahkan mendapatkan data hasil survey IPK maupun IKM untuk dapat dipergunakan bahan monitoring dan evaluasi kinerja.

2. DIGITAL SIGNAGE SYSTEM (DSS)



a) DIGITAL SIGNAGE SYSTEM (DSS) DI KEPANITERAAN DAN KESKRETARIATAN

Digital Signage System (DSS) adalah teknologi informasi digital yang dikemas dalam memberikan tontonan visual yang menarik dan atraktif, memuat beraneka informasi berupa gambar, video, scroll text, chart, grafik, yang disajikan secara dynamic menggunakan media display elektronik seperti LCD/LED TV sebagai output. Dengan konten yang menggantikan papan-papan informasi yang wajib di tampilkan di Kepaniteraan (Pidana, Perdata, Hukum) maupun Kesekretariatan (Umum, Kepegawaian, dan PTIP)

b) DIGITAL SIGNAGE SYSTEM (DSS) DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Digital Signage System (DSS) adalah teknologi informasi digital yang dikemas dalam memberikan tontonan visual yang menarik dan atraktif, memuat beraneka informasi berupa gambar, video, scroll text, chart, grafik, yang

disajikan secara dynamic menggunakan media display elektronik seperti LCD/LED TV sebagai output berupa daftar layanan pada setiap bagian di PTSP

c) FREE CHARGING DAN DIGITAL SIGNAGE SYSTEM (DSS) DI RUANG PUBLIK

Digital Signage System (DSS) adalah teknologi informasi digital yang dikemas dalam memberikan tontonan visual yang menarik dan atraktif, memuat beraneka informasi berupa gambar, video, scroll text, chart, grafik, yang disajikan secara dynamic menggunakan media display elektronik seperti LCD/LED TV sebagai output berupa informasi yang bisa di akses public. Free Charging dapat dimanfaatkan setiap pengguna peradilan untuk mengisi ulang daya battery pada ruang tunggu PTSP dan 2 buah Ruang tunggu Sidang.

3. PANIC BUTTON PADA RUANG SIDANG DAN TOILET DIFABEL



- Penyediaan Panic Button pada Ruang Sidang dimaksudkan untuk langkah antisipasi bagi majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bersidang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di Ruang Sidang.
- Penyediaan Panic Button pada toilet difabel dimaksudkan untuk langkah antisipasi pada pengguna difabel apabila memerlukan pertolongan suatu memanfaatkan toilet difabel.

4. KOTAK PENYIMPANAN HANDPHONE PENGUNJUNG SIDANG



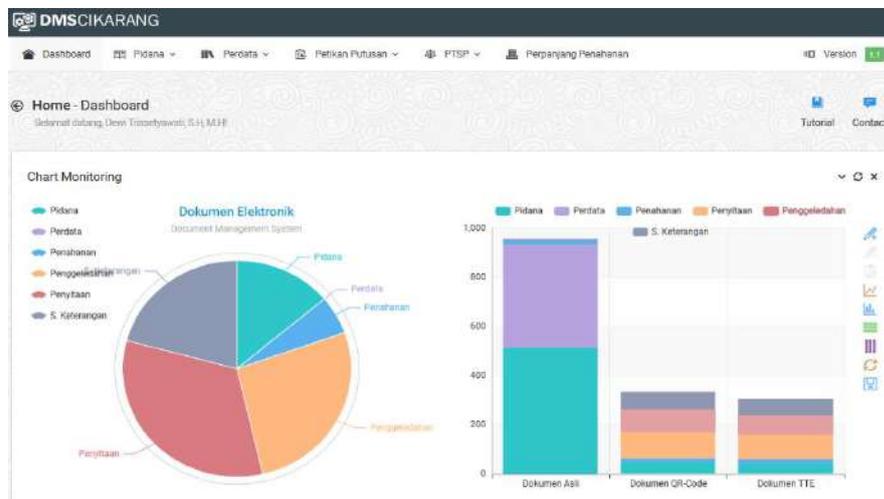
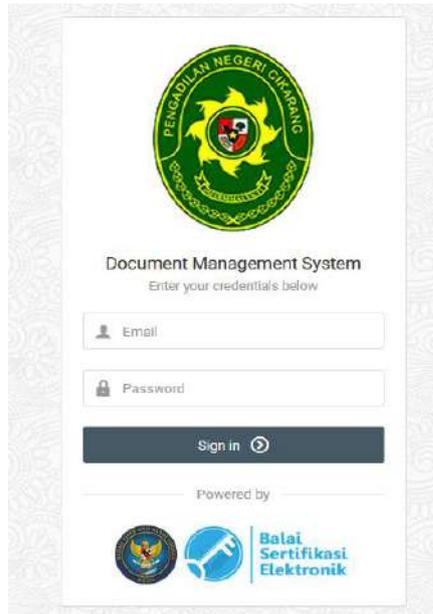
Kotak Penyimpanan Handphone yang terdapat didepan ruang sidang Utama, dimaksudkan untuk pengunjung yang akan mengikuti persidangan dapat menyimpan handphone atau barang lain nya pada kotak tersebut yang dilengkapi kunci pengaman.

5. PEMISAHAN AREA KINERJA DAN AREA PUBLIK DENGAN ACCESS CARD



Pemisahan Area Kinerja dengan Area Publik dimaksudkan untuk membatasi access masuk ke area kinerja oleh pihak yang tidak berhak. Bentuk pengamanan yang dilakukan adalah pemasangan 6 alat door lock dengan kartu access yang hanya dimiliki oleh personel pengadilan negeri cikarang

6. PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL

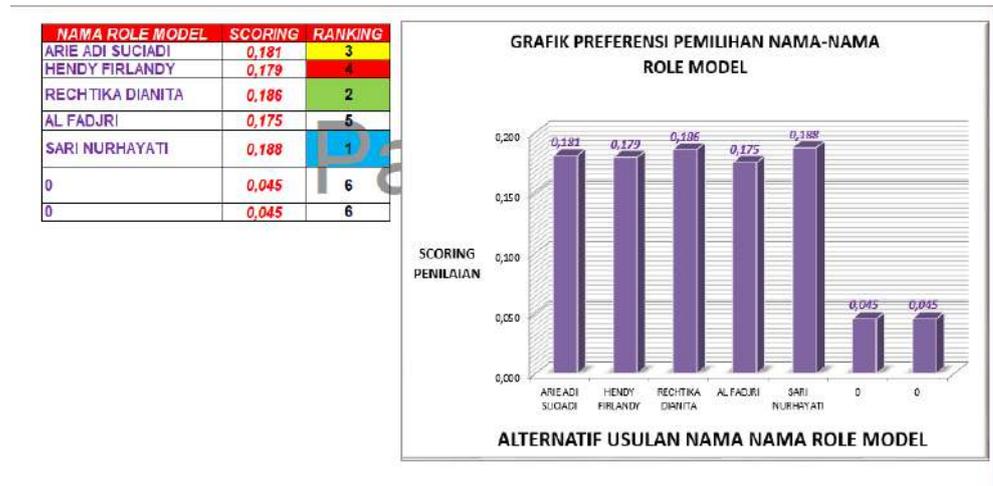


Penggunaan Tanda Tangan Digital dengan aplikasi Digital Management System yang telah tersertifikasi oleh BSSN dan Bsre pada beberapa dokumen yang dikeluarkan PN Cikarang diantaranya :

- Izin/Persetujuan Penyitaan
- Izin/Persetujuan Penggledahan
- Perpanjangan Penahanan
- Surat Keterangan
- Dokumen pada berkas perkara (menunggu persetujuan pimpinan)

Penggunaan tanda tanagn digital yang dilengkapi dengan QR Code menjamin keaslian dokumen dan dapat menghindari adanya pemalsuan dokumen.

7. PENGGUNAAN APLIKASI PADA PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN



Aplikasi pemilihan Role Model dan Agen perubahan dimaksudkan agar pemilihan dapat berjalan dengan Obyektif karena penilaian dilakukan oleh tim dengan penentuan skala prioritas penilaian dan hasilnya dihitung dengan aplikasi yang menampilkan hasil penilaian oleh seluruh tim secara langsung.

8. PEMASANGAN CCTV SEBANYAK 46 TITIK



Pemasangan CCTV sebanyak 46 titik yang mengcover seluruh area pengadilan negeri cikarang. CCTV yang terpasang di ruang public terutama ruang sidang juga terhubung ke Polres untuk dapat menjamin keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Layar monitor CCTV selain di ruang ketua pengadilan negeri juga di pasang di area kinerja sehingga dapat saling mengawasi satu dengan yang lain.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2019, di Pengadilan Negeri Cikarang telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Cikarang sendiri maupun audit keuangan oleh BPKRI. Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Cikarang berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri Cikarang pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dan Panitera/Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

Pengawasan internal yang bersifat reguler/rutin pada Pengadilan Negeri Cikarang di lakukan dengan maksud untuk :

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan ;
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan ;

- mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan ;
- Menilai kinerja aparat peradilan ;
- Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi) .

2. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Cikarang dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- Memeriksa program kerja;
- Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;
- Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
- Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cikarang ;
- Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

3. PELAKSANAAN PENGAWASAN.

Pengawasan rutin / regular bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Negeri Cikarang dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah dengan melakukan pemeriksaan secara konprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - Administrasi perkara ;
 - Administrasi persidangan ;
2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup :
 - Administrasi kepegawaian ;
 - Administrasi keuangan ;
 - Administrasi umum dan inventaris ;
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik .

4. Kedisiplinan waktu

Jam kerja Pengadilan adalah seperti berikut :

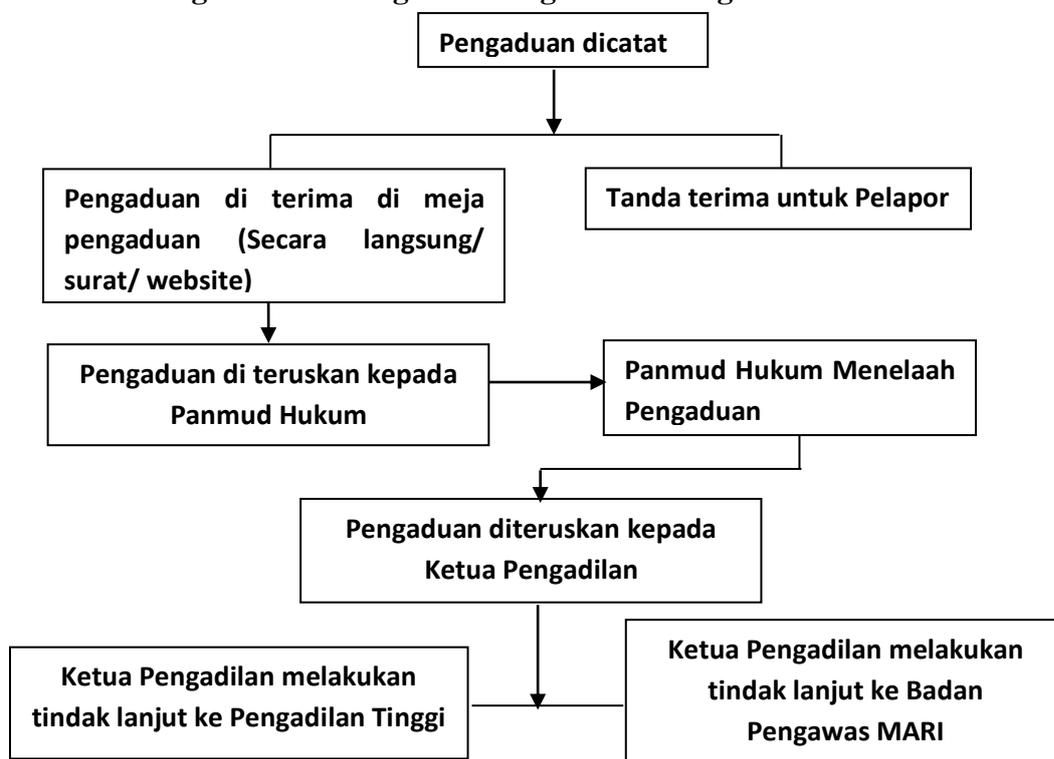
Senin – Kamis	08.00 – 16.30 Istirahat 12.00 – 13.00
Jumat	08.00 – 17.00 Istirahat 11.30 – 13.00

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Cikarang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau para pejabat yang berkopoten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri Cikarang



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Laporan Tahunan 2019 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Cikarang, diantaranya ialah :

- a) Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Cikarang walaupun dalam realisasinya belum optimal.
- b) Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri Cikarang
- c) Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2019 ini banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di tahun 2020 nanti.
- d) Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.
- e) Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2019 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya.
- f) Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.
- g) Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi kami kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran.
- h) Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

- a) Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi mengenai Blue Print Pembaruan Pengadilan 2010-2035.
- b) Perlu disegerakannya informasi terintegrasi antara pengadilan tingkat pertama, banding maupun MA.

- c) Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola keuangan, asset maupun perencanaan kinerja.
- d) Penguatan pengawasan melalui penempatan inspektorat yang berkompeten dari MA yang sifatnya tidak terikat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
- e) Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer kadang bertumpu pada satu orang mohon diadakan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan missal untuk aplikasi komdanas, LPSE, SIMPEG, direktori putusan dan lain-lain.

Melalui laporan tahunan ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Cikarang dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

CIKARANG, 07 Januari 2020
PENGADILAN NEGERI CIKARANG



KETUA
I PUTU GDE ASTAWA, S.H., M.H.
NIP. 197806052000121003

SEKRETARIS

NURMA SAOFIANE, S.H.
NIP.19820419200122001